

PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN FISKAL DAERAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DALAM MENGELOLA POTENSI DAERAH DAN SiLPA TERHADAP TINGKAT KINERJA PELAYANAN PUBLIK

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 -2012).

Rofiqoh Kartikasari, Fuad¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedharto SH
Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aims of this research are to examine the influence of autonomy level to fulfill local fiscal's need, to examine autonomy level to manage local potency and to examine the SiLPA to performaces level of local public service. Measurement used to measure autonomy level to fulfill local fiscal's need by this research is proportion between PAD and DAU. While in terms of autonomy level to manage local potency, the measurement used is proportion between PAD and DBH. SiLPA in this research has no measurement since it is directly obtained from penerimaan pembiayaan. Whereas performance level of local public service as a dependent variable is measured by using proportion of capital expenditure and local expenditure.

This research uses secondary data with population of all local governments in Indonesia which report its realizations of APBD in DJPK since 2006 until 2012. Purposive sampling is a method used in order to determine research's sample. Whereas multiple regression is used as an analysis method.

The result shows that autonomy level to fulfill local fiscal's need (TKMKF) and autonomy level to manage local potency negatively (TKMP) affect performance level of local public service (TKPP) and the SiLPA positively affect performance level of public service (TKPP).

Keywords : *performaces level of local public service, PAD, DAU, DBH and SiLPA*

PENDAHULUAN

Indonesia melakukan perubahan haluan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang tercermin dalam pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah yaitu melalui otonomi daerah yang secara resmi telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2001. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mendasari pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009).

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah (pemerintah kabupaten/kota). Dengan adanya sistem desentralisasi, daerah otonom memiliki beberapa kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi :

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah ;
2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; dan
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

¹ Corresponding author

Dalam pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan pengalihan dana yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah selain dari PAD. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004, dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut pendapat Kuncoro (2007) dalam Ndadari dan Adi (2008) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Fakta lainnya yaitu Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang paling besar diantara pendapatan daerah kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk terjadinya dominasi transfer dari pusat dan juga transfer DBH yang memiliki proporsi terbesar kedua setelah DAU. PAD sebagai sumber pendanaan yang digali dari potensi daerah itu sendiri seharusnya mampu untuk menjadi sumber pendanaan utama dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Karena dengan proporsi PAD yang paling tinggi dalam pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota mengindikasikan kalau pemerintah daerah tersebut mampu untuk membiayai segala kewenangannya dalam menjalankan otonomi daerah atau dengan kata lain daerah tersebut bisa mandiri tanpa menggantungkan bantuan dana dari pusat. Dengan begitu tujuan otonomi daerah untuk mencapai kemandirian daerah dapat terwujud.

Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD. Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian pada saat pemerintah daerah mendapatkan DAU yang lebih tinggi, maka pemerintah meningkatkan belanjanya, namun tidak disertai dengan peningkatan PAD yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam mendanai belanja pemerintah daerah.

Sedangkan pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Stine (1994) yaitu ditemukannya respon pendapatan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pusat adalah asimetris. Penurunan bantuan pusat memicu turunnya PAD (*own source revenue*). Namun Rahmawati (2010) membuktikan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU. Oleh karena itu masalah mengenai ketergantungan belanja daerah terutama untuk belanja yang dapat meningkatkan kemajuan daerah yaitu belanja modal terhadap dana perimbangan khususnya DAU dan DBH akan diteliti lagi dalam penelitian ini.

Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji apakah memang terdapat perilaku asimetris terhadap DAU dan DBH ini, yaitu disaat PAD naik dan DAU maupun DBH juga naik, maka pemerintah daerah akan cenderung mengurangi belanja modalnya. Sedangkan apabila PAD turun dan DAU maupun DBH naik, maka pemerintah daerah akan cenderung meningkatkan belanja modalnya. Moisio (2002) dalam Kusnandar dan Siswanto (2011) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer).

TELAAH PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Yovita, 2011). Dalam konteks anggaran sektor publik ini, peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Rakyat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk memaksimalkan kesejahteraan hidupnya dengan mendapatkan pelayanan publik yang semakin baik. Namun dalam kenyataannya wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering timbul masalah karena tujuan antar keduanya saling berbenturan. Dengan kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah daerah sebagai agen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan bagi pihak mereka saja dan mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemberi wewenang kepada mereka.

Agen sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pemerintahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan rakyat dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu hal ini akan menimbulkan asimetri informasi antara keduanya. Dengan kondisi seperti ini maka agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan agen saja. Tidak dilaksanakannya kewenangan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dengan benar tentunya sangat merugikan rakyat.

Pengertian Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah. Transfer antarpemerintah merupakan fenomena yang umum terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Kuncoro, 2004 dalam Iskandar, 2012). Namun pada kenyataannya dana transfer ini menjadikan pemerintah daerah menjadi semakin bergantung karena dominannya dana transfer ini dalam pendapatan daerah.

Dominannya peran transfer relatif terhadap pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri. Tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil pemerintahannya (Mello dan Barenstrein, 2001 dalam Iskandar, 2012). Kondisi seperti ini menunjukkan pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan yang digali dari masyarakat sendiri daripada dana transfer (grant) yang diterima dari pusat. Hal senada juga dikemukakan oleh Moisiono (2002) yang menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort* nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan oleh pihak lain.

Otonomi Daerah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Menurut Musgrave (1959) dalam Moisiono (2002) sektor publik memiliki 3 (tiga) fungsi dasar : stabilisasi, distribusi dan alokasi. Menurut Kawedar, dkk (2011) fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah (pusat), sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana transfer dari pusat ini pemerintah daerah menjadi bergantung dalam hal keuangan. Ketergantungan ini semakin terlihat jelas apabila kita melihat komposisi penerimaan daerah dalam APBD. Dana perimbangan memiliki proporsi lebih dari 50 % dari jumlah total penerimaan, padahal otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah sehingga dengan ini akan meningkatkan penerimaan di sektor PAD dan dengan PAD yang meningkat akan bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Apabila pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan PAD sebagai sumber dana utama dalam membiayai belanja daerah, hal ini mengindikasikan tujuan otonomi daerah dalam mencapai kemandirian daerah atau dengan kata lain tidak menggantungkan pada dana transfer / dana bantuan dari pusat akan tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kewenangan di bidang keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun apa yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitasnya selama satu periode akuntansi yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan.

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tetapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah

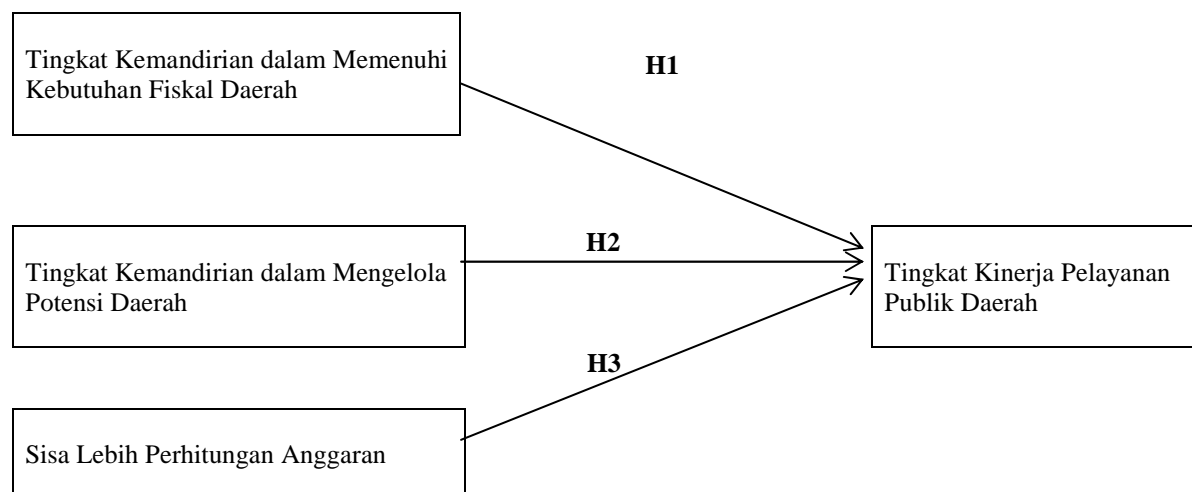
Menurut UU No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Secara teknis proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Kerangka Pemikiran

Variabel dependen dalam penelitian ini tingkat kinerja pelayanan publik, sedangkan variabel independennya adalah tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah, dan SiLPA. Secara lebih jelas, kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu

sendiri yang digali berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Itu artinya bahwa PAD ini merupakan hasil usaha sendiri dari pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan. Adapun komponen dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2011).

Selain dari PAD, pendapatan daerah juga berasal dari transfer pemerintah pusat yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). DAU pada kenyataannya merupakan sumber pendanaan terbesar dan utama bagi pemerintah daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat kepada daerah. Tujuan utama dari pemberian DAU ini adalah pemerataan fiskal sehingga diharapkan akan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Akan tetapi, pemberian dana transfer atau dana perimbangan ini menjadikan daerah sangat bergantung dengan Pemerintah pusat, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dikutip dari Prakosa (2004) beberapa peneliti menemukan bahwa respon Pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Pendapat ini senada dengan pendapat Moisio (2002) yaitu orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort* nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain. Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulus atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999 dalam Prakosa, 2004) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2011) membuktikan bahwa pemerintah daerah masih banyak merespon pengeluaran daerahnya dari transfer pemerintah pusat yang bersifat tidak bersyarat daripada pendapatan asli daerahnya.

H₁ : Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik

Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Selain DAU, pemerintah daerah juga mendapatkan dana bagi hasil yaitu berupa DBH pajak dan non pajak. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan (3) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: (1) Kehutanan, (2) Pertambangan Umum, (3) Perikanan, (4) Pertambangan Minyak Bumi, (5) Pertambangan Gas Bumi, dan (6) Pertambangan Panas Bumi.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka transfer DBH yang diterima pun cenderung akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap belanja modal. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Namun masalah yang sampai sekarang harus diperhatikan yaitu tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap dana perimbangan ini. Adanya kecenderungan seperti ini semakin diperkuat dengan pendapat Gamkhar & Oates (1996 dalam Prakosa, 2004) menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

H₂ : Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik

Pengaruh SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Dalam anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali saldo akhirnya adalah berupa defisit, padahal pada realisasinya beberapa pemerintah daerah mengalami kondisi yang berkebalikan, yaitu surplus.

Dalam kondisi surplus seperti ini, maka ada dana dari pemerintah daerah yang belum digunakan untuk belanja atau pengeluaran pembiayaan, dana ini disebut dana idel. SiLPA tahun berkenaan (SiLPA pada akhir tahun anggaran) merupakan gambaran dana idel pada akhir tahun anggaran, SiLPA tahun berkenaan berasal dari pendapatan yang melebihi anggaran dan/atau realisasi belanja yang lebih kecil. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Kusnandar dan Siswantoro, 2011).

Dalam Jokowi Fokuskan Penggunaan SiLPA 2012 untuk Macet dan Banjir (Kurnia Sari Aziza, 2012) pemanfaatan SiLPA untuk digunakan tahun depan, Jokowi menjanjikan akan digunakan untuk program prioritas, seperti penuntasan kemacetan, banjir, dan pembebasan tanah untuk penataan kampung. Dengan demikian SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal, sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya ataupun yang telah direncanakan pada tahun bersangkutan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu hipotesis SiLPA terhadap Belanja Modal adalah :

H₃ : Besarnya SiLPA pada akhir tahun sebelumnya berpengaruh positif Tingkat Kinerja Pelayanan Publik

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian

Variabel dependen : tingkat kinerja pelayanan publik

Variabel independen : tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah, dan SiLPA

Tingkat Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam tahun anggaran tertentu. Tingkat kinerja pelayanan publik pemerintah daerah diukur dari seberapa besar perbandingan antara Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota per Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah

Tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal diukur dari besarnya perbandingan antara PAD sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan DAU sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kebutuhan fiskal suatu daerah. Apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang tinggi maka tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah dikatakan tinggi, namun apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang rendah maka tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah dikatakan rendah.

Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah

Tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah diukur dari besarnya perbandingan antara PAD sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan DBH sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kemampuan dalam menggali potensi pajak maupun SDA tertentu di daerah. Apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang tinggi maka tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dikatakan tinggi, namun apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang rendah maka tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dikatakan rendah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran SiLPA ini merupakan bentuk dari dana idle

pemerintah daerah yang mana dana idle ini belum digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2006 hingga 2012.
- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melaporkan anggaran dari sektor belanja daerah yang didalamnya memperinci jenis-jenis belanja daerah PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan SiLPA yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.

Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja daerah yang didalamnya memperinci jenis-jenis belanja daerah, dana lokasi umum, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan sisa lebih perhitungan anggaran.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan, buku, artikel serta mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan meliputi : analisis statistik deskriptif dan uji regresi linear. Analisis statistik deskriptif adalah analisis variabel dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum yang menggambarkan persebaran data. Sedangkan uji hipotesis dengan analisis regresi linear meliputi : uji koefisien determinasi (R^2) , uji signifikansi simultan (F test), dan uji signifikansi parameter individual (T test). Ada sebuah persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y_1 = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

dimana :

Y_1 = Tingkat Kinerja Pelayanan Publik/ TKPP (merupakan proksi dari BM per BD)

X_1 = Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah/ TKMKF (merupakan proksi dari PAD per DAU)

X_2 = Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah/ TKMP (merupakan proksi dari PAD per DBH)

X_3 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

b_1 = Koefisien regresi untuk variabel X_1

b_2 = Koefisien regresi untuk variabel X_2

b_3 = Koefisien regresi untuk variabel X_3

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jumlah Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah sendiri berjumlah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota. Propinsi Jawa Tengah merupakan Propinsi yang terletak ditengah pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi objek dalam penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

1. Kab.Banjarnegara	13. Kab. Kendal	25. Kab.Sukoharjo
2. Kab. Banyumas	14. Kab.Klaten	26. Kab. Tegal
3. Kab.Batang	15. Kab.Kudus	27. Kab.Temanggung
4. Kab. Blora	16. Kab. Magelang	28. Kab.Wonogiri
5. Kab.Boyolali	17. Kab.Pati	29. Kab.Wonosobo
6. Kab.Brebes	18. Kab. Pekalongan	30. Kota Magelang
7. Kab.Cilacap	19. Kab.Pemalang	31. Kota Pekalongan
8. Kab.Demak	20. Kab.Purbalingga	32. Kota Salatiga
9. Kab.Grobogan	21. Kab. Purworejo	33. Kota Semarang
10. Kab.Jepara	22. Kab. Rembang	34. Kota Surakarta
11. Kab. Karanganyar	23. Kab. Semarang	35. Kota Tegal
12. Kab. Kebumen	24. Kab.Sragen	

Sumber : Rahmawati (2010)

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah nilai rata rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang tersaji pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TKPP	184	.00	.53	.1543	.07573
TKMKF	226	.00	170.23	.8591	11.31683
TKMP	209	.00	7.06	1.1231	.95393
SiLPA2	234	.00	685892.00	92349.8815	110439.04382
Valid N (listwise)	166				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari tabel 2, standar deviasi TKPP dan TKMP lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, artinya tidak terdapat variasi pada kedua data tersebut. Sedangkan standar deviasi TKMKF dan SiLPA2 lebih besar dari rata-ratanya, artinya terdapat variasi pada kedua data tersebut.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dan SiLPA terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah dengan menggunakan uji R^2 , uji F, dan uji t yang disajikan pada tabel tabel 3, 4, dan tabel 5. Sedangkan ringkasan hasil pengujian hipotesis dan hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah disajikan pada tabel 6.

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,533 ^a	0,284	0,271	0,65517878138

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Nilai adjusted Rsquare sebesar 0,271, artinya 27,1% variabel dependendapatdijelaskanolehvariabelindependen. Sisanya72,9% , variabel dependen dijelaskanolehvariabel lain diluar model.

Tabel 4
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,291	3	0,097	22,614	,000 ^a
Residual	0,734	171	0,004		
Total	1,025	174			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Nilai F sebesar22,614dan Sig. 0,000 ($< 0,05$), makadapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah.

Tabel 5
UjiSignifikansi Parameter Individual (UjiStatistik t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,161	,008		20,478	,000
TKMKF	-,001	,000	-,189	-2,742	,007
TKMP	-,022	,005	-,284	-4,320	,000
SiLPA2	8,078E-13	,000	,536	7,679	,000

Sumber: Data yang diolah, 2013

Tabel 6
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
1.	Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi kebutuhan Fiskal Daerah Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Signifikan negatif, hipotesis diterima , karena $t = -2,742$ dan signifikansi 0,007 pada $\alpha = 5\%$
2.	Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Signifikan negatif, hipotesis diterima , karena $t = -4,320$ dan signifikansi 0,000 pada $\alpha = 5\%$
3.	Besarnya SiLPA Pada Akhir Tahun Sebelumnya Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Signifikan, hipotesis diterima , karena $t = 7,679$ dan signifikansi = 0,000 pada $\alpha = 5\%$

Pembahasan Hipotesis

Hasil Uji Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah”. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan TKMKF 0,007 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa TKMKF berpengaruh negatif terhadap TKPP. Ketika ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dalam hal ini yaitu dana perimbangan masih sangat tinggi maka ketika PAD yang dihasilkan cenderung turun sedangkan DAU yang diterima cenderung naik sehingga menunjukkan TKMKF turun maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya yaitu alokasi untuk belanja modal cenderung naik sehingga menunjukkan TKPP akan naik. Ada kecenderungan yang lebih kuat ketika pemerintah daerah merespon kenaikan atau penurunan DAU dibandingkan dengan respon terhadap pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah yaitu PAD. Pendapat mengenai respon pemerintah daerah ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moisio (2002) yaitu orang-orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Febrian (2011) yang membuktikan bahwa pemerintah daerah masih banyak merespon pengeluaran daerahnya dari transfer pemerintah pusat yang bersifat tidak bersyarat daripada pendapatan asli daerahnya. Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi atau dengan kata lain respon daerah yang tinggi terhadap DAU untuk alokasi ke Belanja Modal maupun belanja daerah secara keseluruhan adalah besarnya DAU yang diberikan oleh pusat kepada daerah adalah sangat besar dan bahkan menjadi dominan dalam sektor pendapatan daerah.

Hasil Uji Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah”. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan TKMP 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa TKMP berpengaruh negatif terhadap TKPP. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Arbie Gugus Wandira (2013) yang membuktikan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ketika ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dalam hal ini yaitu dana perimbangan masih sangat tinggi maka ketika PAD yang dihasilkan cenderung turun sedangkan DBH yang diterima cenderung naik sehingga menunjukkan TKMP turun akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya yaitu alokasi untuk belanja modal cenderung naik sehingga menunjukkan TKPP akan naik.

Selain DAU, DBH ini juga merupakan dana perimbangan dari pusat untuk pemerintah daerah yang cukup besar proporsinya. Berbeda dengan penerimaan DAU yang bersifat tidak bersyarat, apabila pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka transfer DBH yang diterima pun cenderung akan semakin besar.

Hasil Uji Besarnya SiLPA pada akhir tahun sebelumnya terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Besarnya SiLPA pada akhir tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah”. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan SiLPA 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap TKPP. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2011) yang membuktikan bahwa secara empiris besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Sedangkan secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dalam Ardhini dan Sri Handayani (2011) mengatakan bahwa SiLPA tahun anggaran sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai hubungan tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah dan SiLPA terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai TKMKF tinggi maka TKPP akan rendah dan sebaliknya.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai proporsi PAD per DBH tinggi maka proporsi Belanja Modal per Belanja Daerah akan rendah dan sebaliknya.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya SiLPA pada akhir tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai SiLPA tinggi maka TKPP akan tinggi juga.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yakni:

1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada komponen yang terdapat dalam APBD saja. Sehingga komponen lain diluar APBD yang mungkin memiliki pengaruh terhadap belanja modal belum diketahui seberapa besar pengaruhnya.
2. Objek penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan domisili peneliti, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik yang dinilai dari besarnya alokasi belanja modal.
3. Periode penelitian ini hanya dibatasi dari tahun 2006 sampai 2012. Tahun 2006 merupakan periode ke enam dimana otonomi daerah telah berjalan di Indonesia, sehingga diharapkan mampu untuk menunjukkan perbaikan keuangan daerah yang dinilai berdasarkan APBD dari tahun anggaran tersebut sampai tahun 2012.

Saran

Saran-saran dari peneliti yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota meningkatkan kemandirian daerah sebagai perwujudan dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini sedang berjalan dengan menggali Pendapatan Asli Daerah secara optimal, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat bisa dikurangi. Keseluruhan belanja daerah bisa dibiayai secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota apabila tingkat penerimaan PAD nya tinggi dan kekurangannya bisa dibiayai dengan dana perimbangan dari pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak objek penelitian agar hasilnya bisa digeneralisasi dan mungkin memperpanjang periode penelitian yaitu dari awal pelaksanaan otonomi daerah yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2013.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, pemilukada yang terjadi di beberapa daerah selama periode 2006 sampai 2012 yang mungkin berpengaruh terhadap APBD. R square menunjukkan bahwa sebesar 27,1 % variasi variabel belanja modal per belanja daerah dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independennya, sehingga sebesar 72,9 % nya dijelaskan variabel lain diluar model.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2009. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah: Studi Pada Kabupaten / Kota se Jawa-Bali*. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009. Universitas Kristen Satya Wacana: Salatiga.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Profil APBD TA 2012*. Jakarta: DJPK.
- Fahri, Marratu. 2010. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Urgensi Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Universitas Bandar Lampung : Lampung.
- Febrian, Riandasa Anugerah. 2011. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah*. Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Universitas Kristen Satya Wacana : Salatiga.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. Universitas Brawijaya : Malang.
- Iskandar, Irham. 2012. *Flypaper Effect Pada Unconditional Grant*. Universitas Padjajaran : Bandung.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Kawedar, dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Lampiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- . *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset : Yogyakarta.
- Moisio, Antti. 2002. *Essays On Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants*. Government Institute For Economic Research: Helsinki.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya 6 September 2008.
- Penas, Santiago Lago. 2005. *The Effect Of Grants Cuts On Public Deficit: Does Incumbent's Ideology Matter?*. University Of Vigo: Spain.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Mendagri.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. JAAI Volume 8 No. 2, Desember 2004.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP : Semarang.
- Stine, William F. *Is Local Government Revenue Response To Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government In An Era Of Retrenchment*. National Tax Journal Vol. 47 No. 4, December 1994.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Alokasi Modal*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP : Semarang.
- Wandira, Arbi Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang : Semarang.



Yovita, Farah Marta. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008-2010*. Universitas Diponegoro: Semarang.